

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN BERBASIS LINGKUNGAN DI KOTA MOJOKERTO

Herrukmi Septa Rinawati)*

ABSTRAK

Dalam kondisi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini pemerintah daerah dipaksa untuk segera memacu diri agar berfikir kreatif, inovatif, dan cepat. Jika tidak, maka bayang-bayang permasalahan sosial yang akut akan selalu menghantui seperti kemiskinan dan pengangguran. Salah satu cara untuk mengatasinya, pemerintah daerah harus segera berbenah diri menjadi motivator dan fasilitator untuk menyadarkan dan memberdayakan warga miskin dalam lingkup kecil, guna mengenali lingkungan terkecil di dekatnya dan memanfaatkannya sesuai potensi daerah masing-masing. Juga membangun kesadaran masyarakat miskin dengan konsep pemberdayaan dengan menggali dimensi-dimensi pendukung dan pendorong pemberdayaan yakni dimensi konsep, proses, tujuan, dan indikator.

Kata kunci : *pemberdayaan masyarakat miskin, lingkungan, dimensi pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang mendera bangsa Indonesia sejak awal reformasi pada 1998 hingga saat ini masih belum mampu memulihkan kondisi masyarakat dari jerat kemiskinan. Akibat krisis ekonomi tingkat kemiskinan naik cukup tajam. Pada 2001 penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 7,2 juta orang, atau 20,7 persen. Pada 2003 menurun menjadi 19,5 persen. Pada tahun 2004 secara relatif menurun lagi, menjadi 19,1 persen atau sebanyak 6,9 juta orang. Kemudian pada 2005 dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jumlah penduduk miskin meningkat kembali. Pada 2005 juga dipastikan jumlah pengangguran makin meningkat, karena ketidakseimbangan jumlah kesempatan kerja yang tersedia dengan penambahan tenaga kerja dan PHK.

Sementara APBD Jawa Timur sebagai salah satu instrumen Pemprov Jatim yang bisa dipakai untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial nampaknya tidak bisa berbuat banyak menghadapi krisis ekonomi. Karena pengalokasian dana dari APBD Pemprov Jatim biasanya sudah pasti peruntukannya dan sulit dirubah. Sehingga jika terjadi problem krisis ekonomi yang bersifat mendadak biasanya pemerintah daerah tidak siap untuk menyelamatkan masyarakat miskin. Dengan kata lain APBD Pemprov Jatim tidak akan mampu menutup kebutuhan rakyat miskin ketika terjadi kenaikan BBM. Kalaupun ada perubahan anggaran kegiatan (PAK) sangat kecil kemungkinannya untuk alokasi program langsung penyelamatan kaum miskin perkotaan dan pedesaan.

**) Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya*

Berangkat dari ketidaksiapan APBD pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut, maka seluruh pemerintahan daerah baik kota maupun kabupaten di Jawa Timur beserta jajarannya dan masyarakatnya harus mempunyai sikap dan jiwa yang kreatif dan inovatif mencari jalan keluar sendiri-sendiri dalam upaya menghadapi krisis ekonomi yang sewaktu-waktu datang.

Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan menimbulkan problem kemiskinan, juga berbagai persoalan lain yang mengikutinya. Salah satunya di wilayah Kota Mojokerto seperti tingginya angka pertumbuhan PKL (pedagang kaki lima), gelandangan, pengemis, pengangguran, dan problem sosial lainnya seperti kelompok masyarakat penyandang masalah sosial yang selama ini di tampung dan dibina di bawah Yayasan Suwonoblong.

Salah satu upaya Pemkot Mojokerto dalam mengurangi kemiskinan akibat krisis ekonomi adalah memberdayakan warganya. Pemkot Mojokerto segera melakukan langkah kreatif dan inovatif mendorong dan memberi kesempatan warganya untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Caranya dengan membangun kesadaran dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kesejahteraannya secara mandiri.

Upaya-upaya memberdayakan masyarakat Kota Mojokerto berbasis lingkungan akan mengurangi beban Pemkot Mojokerto terutama jika krisis ekonomi datang secara tiba-tiba. Untuk menghadapi situasi seperti ini diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat miskin

berbasis lingkungan wilayah, khususnya lingkungan sosial ekonomi mikro. Upaya tersebut, diarahkan ke bentuk-bentuk pemberdayaan yang lebih mendorong kemandirian kelompok dan individu.

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin perlu dikembangkan potensi yang ada di Kota Mojokerto. Berbagai potensi tersebut bisa saja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat, ataupun dapat pula memanfaatkan *resources* yang ada di sekitarnya semisal peran swasta dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang akhir-akhir ini program tersebut gencar dilaksanakannya.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana karakteristik dan kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat miskin di Kota Mojokerto ?; 2) Bagaimana kondisi pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto ditinjau dari beberapa dimensi pemberdayaan ?

Tujuannya adalah untuk memberi masukan kepada pemerintah setempat dan masyarakat miskin di Kota Mojokerto tentang pentingnya menyadarkan dan memberdayakan masyarakat miskin dengan menekankan pada dimensi-dimensinya.

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Menurut K. Suhendra : 2006, dari buah karya dan pikiran para ahli pemberdayaan dapat dilihat dari berbagai dimensi yaitu,

dimensi konsep, dimensi proses, dimensi tujuan, dan dimensi indikator.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep yang mulia karena sangat menghargai harkat dan martabat manusia. Suatu cita yang idealis, suatu *das sollen*. Pemberdayaan masyarakat analog dengan konsep demokrasi dan kesejahteraan sosial serta kedaulatan rakyat. Dengan kondisi pemberdayaan masyarakat yang tercipta di suatu masyarakat bangsa, maka akan terbentuk suatu sinergis berbagai komponen bangsa ya pemerintah ya masyarakat serta pengusaha. Akan terbentuk tatanan masyarakat yang harmonis, dinamis terhindar dari konflik-konflik sosial yang merugikan. Anggota masyarakat akan dapat mengoptimalkan kreativitas dan aspirasinya, saling bertoleransi, saling menyayangi, terbentuk suatu suasana yang *tat wam asi, homo sacra res homini* (kamu adalah aku, manusia menyayangi sesama), walau dalam kemajemukan. Semakin modern suatu masyarakat akan menjadi semakin majemuk dari unsur ras, agama, suku, golongan, profesi, akan tetapi dalam tatanan masyarakat yang berdaya akan menjadi "*bhineka tunggal ika*", *unity in diversity*.

Dimensi proses, konsep pemberdayaan masyarakat telah menjadi kuasa kata di berbagai tulisan, lokakarya, seminar dan sebagainya lebih dari tiga dasa warsa di Indonesia. Kita telah familier dengan istilah *people empowerment, people centered development, demokrasi, kesejahteraan sosial, kedaulatan rakyat, masyarakat madani (civil society)*. Suatu cita ke realita ternyata khususnya di Indonesia

merupakan proses yang memerlukan waktu cukup panjang dan memerlukan banyak pengorbanan.

Dimensi tujuan, pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri, demokratisasi, kesetaraan masyarakat dengan pemerintah, kebebasan berbicara, kebebasan berkegiatan, hak untuk merencanakan, hak untuk mengelola asset lokal, hak untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, hak untuk menikmati jerih payah sebagai buah pembangunan adalah sekaligus tujuan yang akan dituju oleh gerakan pemberdayaan masyarakat.

Dimensi indikator, kalau suatu ketika akan mengukur apakah pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka perlu indikator. Tinggal membandingkan kriteria normatif dengan realita. Apabila senjangnya kecil pemberdayaan masyarakat relatif berhasil, sebaliknya apabila senjangnya besar maka pemberdayaan masyarakat tidak berjalan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ditinjau dari segi manfaatnya adalah penelitian terapan. Berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana data-data sekunder dan primer yang dicari berbentuk kata-kata atau kalimat dan informasi kualitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif karena objek dari penelitian ini adalah manusia, sistem, dan kebijakan yang berkaitan dengan permodelan sebuah kebijakan. Namun metode pengumpulan datanya dibantu dengan metode kuantitatif

yang berupa angka-angka untuk memudahkan penganalisaan.

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) di Kota Mojokerto yang berjumlah ± 18.265 jiwa pada tahun 2007. Responden dan informan adalah masyarakat miskin, instansi Pemkot Mojokerto, perusahaan di Pemkot Mojokerto, LSM di Pemkot Mojokerto, DPRD kota Mojokerto, dan tokoh masyarakat.

Dengan jumlah sampel masing-masing terdiri dari : 46 responden dari masyarakat miskin, 5 instansi Pemkot yang terkait (Bapemas, Bappeko, Dinas Kesejahteraan Sosial, Kantor Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian), 8 tokoh masyarakat, 6 LSM, dan 3 Perusahaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survei, wawancara mendalam, pengamatan, dan diskusi kelompok. Pengolahan data dilakukan secara manual dengan bantuan statistik

deskriptif dan bantuan *software excell*. Data primer dan sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis interaktif model Miles dan Haberman.

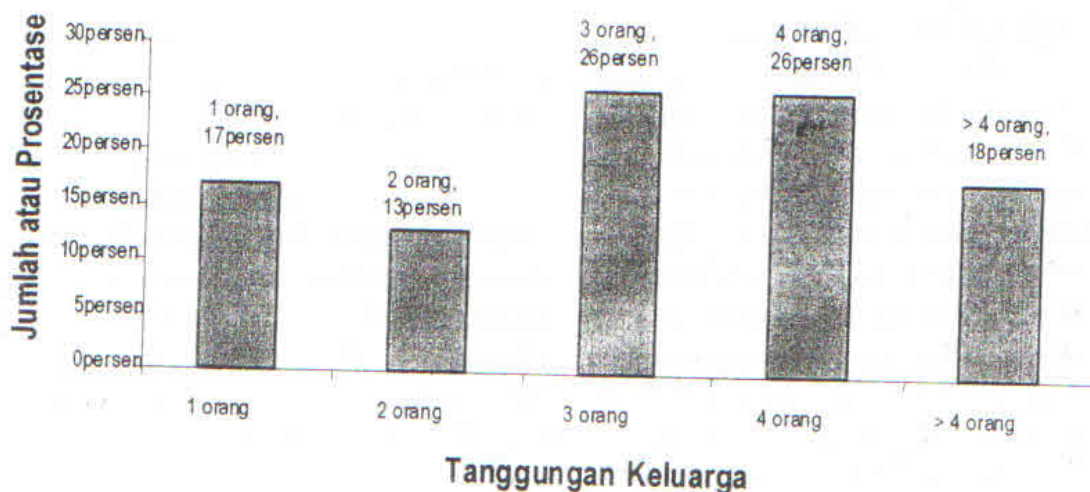
HASIL dan PEMBAHASAN

Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Mojokerto

Karakteristik pekerjaan masyarakat miskin di kota Mojokerto tersebar dalam 15 bidang jenis pekerjaan, yaitu tukang becak, ibu rumah tangga, pedagang, jagal, serabutan, pengamen, swasta, pemulung, tukang pijat, PRT, bengkel, pensiunan, penjahit, PNS, dan tukang batu.

Mereka mempunyai penghasilan rata-rata per bulan adalah antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Dengan usia berkisar 21 - 60 tahun yang merupakan usia produktif. Tingkat pendidikan terbanyak adalah SD dan SMP, yaitu sebesar antara 24 persen dan 43 persen.

Diagram 1
Tanggungjawab Keluarga



Jumlah rata-rata tanggungan keluarga yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin di Kota Mojokerto adalah 4 sampai 5 orang jiwa (diagram 1). Dengan status kepemilikan rumah atau tempat tinggal yang mereka tempati rata-rata adalah milik sendiri atau sewa. Responden rata-rata memiliki rumah dan

tanah pekarangan cukup luas, yaitu luas rumah rata-rata berkisar antara 2 x 2,5 M² sampai 49 x 36 M² dan luas pekarangan rata-rata antara 2 x 3 M² sampai sampai 600 m².

Dalam bentuk tabel karakteristik dan kondisi sosial ekonomi responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Karakteristik Sosial Ekonomi (Responden) Masyarakat Miskin di Kota Mojokerto Tahun 2009

NO	URAIAN	KET	PERSENTASE	KLASIFIKASI
1	Jenis Pekerjaan	Terbanyak	32, 6 persen swasta	tukang becak, pedagang, jagal, serabutan, pengamen, pemulung, tukang pijat, PRT, bengkel, penjahit, dan tukang batu.
2	Penghasilan	Rendah	28 – 44 persen	< Rp 200 Ribu; Rp 501 – Rp 1 jt
3	Usia	Terbanyak	40 – 50 persen	21 th – 60 th; Usia Produktif
4	Tingkat Pendidikan	Terbanyak	24 – 43 persen	SD dan SMP
5	Tanggungan keluarga	Terbanyak	26 persen	3 sampai 4 orang jiwa
6	Status Rumah	Terbanyak	37 – 43 persen	Milik sendiri dan sewa
7	Sebaran masyarakat miskin di Kota Mojokerto	Di Kecamatan Prajurit Kulon, yaitu berturut-turut di wilayah Blooto, Miji, Kranggan, Prajurit Kulon, Surodinawan, Mentikan, Pulorejo, dan Kauman. Sementara di Kecamatan Magersari berturut-turut adalah di wilayah Kedundung, Wates, Meri, Magersari, Gunung gedangan dan Balongsari.		
8	Pemanfaatan lingk.	48 persen warga miskin (responden) memiliki lahan dan pekarangan kosong seluas antara 2 x 3 M ² sampai 600 M ² . Reponden memanfaatkan lahan kosongnya dengan berternak, berkebun, dagang, buka warung, dan untuk kontrakan		

Sumber : Diolah dari data Primer, Mojokerto, 2009

Sistem Nilai yang Berlaku

Sistem nilai yang masih hidup subur di masyarakat miskin di Kota Mojokerto antara lain adalah (1) berkaitan dengan pandangan mereka terhadap kewajiban bekerja bagi kepala keluarga; (2) sikap atau pandangan terhadap anggota keluarga yang sudah dewasa tapi belum bekerja; (3) pandangan tetangga terhadap tetangga lain yang belum bekerja; (4) kebiasaan anggota keluarga yang suka menunda-nunda pekerjaan; (5) sikap tetangga jika ada tetangganya yang mengalami musibah; (6)

apresiasi terhadap warga yang mengeluarkan pendapat; dan (7) aspek-aspek gotong-royong.

Nilai-nilai pertanggungjawaban yang berkembang terhadap filosofi “pekerjaan dan bekerja”, dari data primer diperoleh informasi, 100 persen responden memandang “bekerja” untuk menghidupi keluarganya adalah sesuatu keharusan dan kewajiban yang merupakan tindakan mulia. Di samping itu bekerja merupakan ekspresi untuk menegakkan harkat dan martabatnya sebagai kepala rumah tangga

serta agar tidak menjadi beban orang lain atau pemerintah.

Bahkan jika di antara keluarga responden ada yang sudah dewasa tetapi tidak bekerja, maka 61 persen kepala keluarga akan mencarinya pekerjaan dan 39 persen akan menasehatinya agar segera bekerja untuk menjadi manusia mandiri.

Begitu juga sikap tetangga terhadap tetangga lain yang mempunyai anggota keluarga yang sudah dewasa tetapi belum bekerja juga memberikan respon yang bagus. 48 persen menasehati agar segera mencari pekerjaan dan bahkan 26 persen para tetangganya mau mencoba bersusah-susah mencarinya pekerjaan. Minimal memberikan informasi tentang pekerjaan.

Sikap responden atau kepala keluarga dalam memandang anggota keluarganya yang sudah bekerja tetapi suka menunda-nunda pekerjaan, maka sebanyak 80 persen responden menasehati, 11 persen memarahi, dan 9 persen membiarkan. Juga sikap kekeluargaan diantara masyarakat miskin di Kota Mojokerto masih terjalin sangat erat dan kuat. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi tetangga yang mengalami sakit, dimana lebih dari 66 persen tetangganya akan membesuk dan memberikan bantuan semampunya.

Sistem nilai kemasyarakatan lainnya yang masih terpelihara dan terjaga dengan baik adalah sikap saling menghargai dan sekitar 72 persen warga masyarakat miskin masih sering melakukan kerja gotong-royong diantara mereka. Begitu juga dalam setiap pertemuan warga setingkat RT dan RW, 100 persen sesama warga saling menghargai jika ada warga yang mengeluarkan pendapat.

Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin

Kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat miskin di Kota Mojokerto diuraikan dari aspek-aspek: (1) seringnya diadakan pertemuan rutin; (2) kesulitan ekonomi antar tetangga; (3) pemikiran untuk memanfaatkan lingkungan pekarangan; (4) potensi lingkungan yang bisa dimanfaatkan; (5) pertemuan rutin antar warga; (6) topik yang sering dibahas dalam pertemuan rutin antar warga; (7) kebebasan mengeluarkan pendapat; dan (8) pembicaraan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat miskin.

Kehidupan dan hubungan sosial di antara masyarakat miskin secara umum terjalin cukup baik dan erat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya dilakukan pertemuan rutin di antara mereka untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi lemah, 70 persen diantara mereka sering melakukan pertemuan rutin. Sementara 19 persen mengatakan jarang melakukan pertemuan rutin, dan 11 persen mengatakan tidak pernah dilakukan pertemuan rutin diantara mereka.

Pada saat tetangga mengalami kesulitan keuangan maka sikap tetangga lainnya sangat membantu. Hal ini diwujudkan dengan cara melakukan iuran diantara mereka untuk membantu tetangga yang mengalami kesulitan keuangan. Dari responden yang disurvei dan diwawancarai sebanyak 92 persen akan membantu sebisanya kepada tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Hanya sisanya yaitu 8 persen mengatakan tidak peduli.

Terkait dengan kondisi lingkungan masyarakat miskin (responden) yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan secara ekonomi dari 46 responden ada sekitar 23 atau sekitar 48 persen responden yang memiliki lahan pekarangan kosong dengan luasan antara $2 \times 3 \text{ m}^2$ sampai 600 m^2 .

Rata-rata sekitar 72 persen responden memanfaatkan lahan kosong mereka untuk diolah agar bermanfaat dan menghasilkan uang. Sementara sisanya yaitu 28 persen tidak memanfaatkan lahan pekarangan mereka karena terbatasnya modal sehingga membiarkan kosong. Sementara jenis-jenis pemanfaatannya adalah untuk berternak ada 11 persen,

berkebun ada 63 persen, berdagang ada 19 persen, dan untuk kontrakan 7 persen.

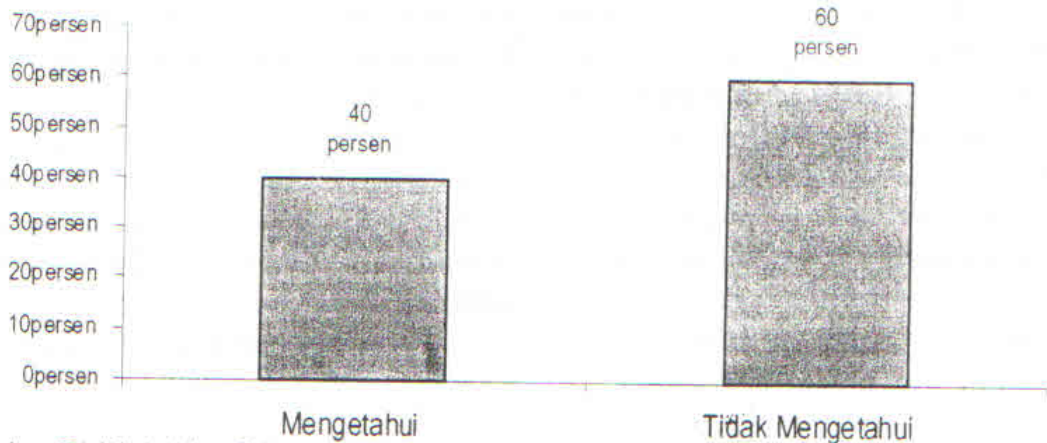
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Ditinjau dari Berbagai Dimensi

Pemberdayaan masyarakat miskin ditinjau dari dimensinya ada 4 dimensi, yaitu dimensi konsep, dimensi proses, dimensi tujuan, dan dimensi indikator.

1. Dimensi Konsep

60 persen tidak mengetahui tentang program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Pemkot Mojokerto. Hanya 40 persen responden yang mengetahui (Diagram 2). Mereka mengetahui adanya program pemberdayaan miskin dari media masa seperti televisi dan dari RT/RW.

Diagram 2
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin



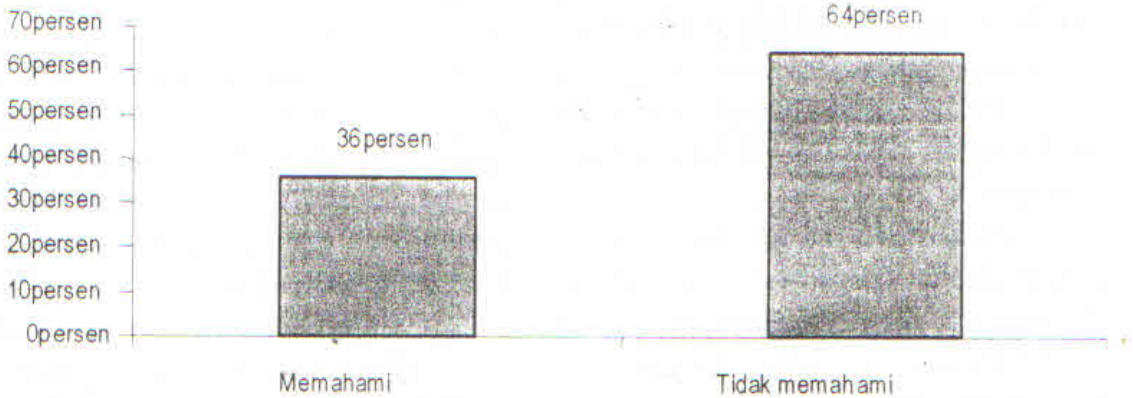
Sumber: Diolah dari data Primer, Mojokerto, 2009

Responden yang memahami tentang program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto hanya 36 persen sedangkan yang belum memahami tentang program pemberdayaan masyarakat miskin adalah 64 persen. Atas dasar informasi tentang pemahaman dan pengetahuan yang minim tentang pemberdayaan

masyarakat miskin tersebut di atas, maka hampir semua masyarakat miskin dan tokoh masyarakat tidak tahu bagaimana konsep memberdayakan masyarakat miskin itu. Dalam bentuk diagram batang pemahaman masyarakat miskin di Kota Mojokerto dapat dilihat pada Diagram 3.

Diagram 3

Pemahaman Responden Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Mojokerto



Sumber : Diolah dari data Primer, Mojokerto, 2009

Sementara pemberdayaan masyarakat miskin (dimensi konsep) dari sisi pemerintah dalam hal ini Dinas KLH, Dinas Kesejahteraan Sosial, Bappeko, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Bapemas dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada umumnya konsep yang diterapkan oleh Pemkot Mojokerto adalah sesuai dengan visi-misi dan Renstra Kota Mojokerto dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan program kerja dan kegiatan masing-masing Satker yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Secara rinci, konsep yang diterapkan dari Pemkot Mojokerto adalah mendata dan mengalokasikan bantuan khusus yang mengacu pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau PNPM, memberdayakan kelompok sasaran melalui program kelompok usaha bersama dan melakukan pendampingan.

Memberikan bantuan modal yang dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat miskin. Memberikan bantuan Saprodi (sarana produksi) seperti benih, pupuk, dan obat-obatan kepada petani. Pemberian bantuan Saprodi ini dimaksudkan sebagai stimulan untuk merangsang masyarakat khususnya petani agar berusaha meningkatkan produksinya. Selain itu program bantuan lainnya dirupakan dalam bentuk BLT, bedah rumah, perbaikan rumah kumuh, P2KP, Raskin, Sembako, Jamkes, dan JPS.

Sementara dari sisi LSM, Perusahaan, dan DPRD Kota Mojokerto belum ada konsep tersendiri dalam memberdayakan masyarakat miskin. Selain konsep-konsep dan program-program pemberdayaan masyarakat miskin yang telah didesain oleh Pemerintah Pusat seperti yang disebutkan di atas.

Memberdayakan masyarakat miskin di Kota Mojokerto masih sebatas melaksanakan program-program paket pemberdayaan masyarakat miskin dari Pemerintah Pusat yang cenderung kurang memberdayakan masyarakat miskin dari sisi kualitas. Pemberdayaan masyarakat miskin masih dianalogkan sebagai "memberi ikan" yang cuma-cuma alias gratis kepada masyarakat miskin, seperti pemberian BLT, Raskin, dan Sembako.

Meskipun ada juga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan tindakan yang mengarah pada penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia, misalnya memberikan pelatihan akan suatu keahlian dan pendampingan, namun upaya ini belum berjalan optimal.

Hal ini karena masih kuatnya budaya masyarakat miskin di Kota Mojokerto yang masih suka "menerima" daripada "berusaha". Dengan kata lain kebiasaan masyarakat miskin yang hanya selalu menengadahkan tangan atau "krida lumahing asta" masih hidup subur. Sehingga banyak masyarakat miskin di Kota Mojokerto yang belum mengerti dan paham serta tahu apa konsep memberdayakan masyarakat miskin itu. Selain itu program pemberdayaan masyarakat miskin dalam pelaksanaannya di Pemkot Mojokerto tidak ada yang mengawasi dan yang menilai tentang keberhasilannya.

2. Dimensi Proses

Bahwa pemberdayaan masyarakat miskin sebagai proses memerlukan waktu yang tidak pendek. Ada beberapa langkah

yang harus dilalui mulai dari (1) pelibatan masyarakat miskin itu sendiri; (2) pelibatan sekelompok masyarakat miskin yang lebih luas (RT/RW); (3) pengenalan program; (4) pengenalan institusi perbankan dan prosedurnya serta peruntukannya; (5) program-program bantuan keuangan bagi masyarakat miskin serta jenis usaha; (6) pemasaran produk usaha masyarakat miskin; (7) motivasi dan kesungguhan dari pemerintah; dan (8) metode serta tatacara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah setempat.

Ditinjau dari sisi masyarakat miskin (responden) dan tokoh masyarakat, 40 persen pernah dihubungi dan dilibatkan oleh pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto. Sementara 60 persen tidak pernah dihubungi dan dilibatkan oleh Pemkot Mojokerto dalam program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto.

Bagi warga miskin dan tokoh masyarakat yang pernah dilibatkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto sebagian besar keinginannya diperhatikan pemerintah setempat. Sementara ditingkat RT/RW jika ada rapat yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat miskin dalam setiap pengambilan keputusannya forum sangat menghargai pendapat yang diajukan oleh peserta rapat.

Program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto sebagian besar berupa bantuan raskin, BLT, Jamkesmas, peralatan usaha, dan pinjaman dana bergulir. Warga masyarakat miskin (responden) yang sudah menerima Raskin,

BLT, Sembako, dan Jamkesmas adalah sebesar 24 persen. Kredit tanpa bunga sebesar 4 persen. Peralatan usaha 9 persen. Pelatihan 2 persen. Dan sisanya yaitu 61 persen belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa.

Aksesibilitas warga miskin ke Perbankan juga minim, dari 46 responden yang ditanya dan diwawancarai hanya 24 persen yang pernah berhubungan dengan perbankan, dalam arti mengajukan pinjaman ke bank. Sementara sisanya yaitu 76 persen belum pernah berhubungan dengan pihak perbankan. Dan kebanyakan pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif, bukan untuk melakukan atau membuka usaha bisnis atau memperbesar usahanya.

Sebesar 26 persen responden mengetahui dan paham tata cara mengajukan kredit ke bank dan 74 persen tidak atau belum paham bagaimana tata cara mengajukan kredit ke bank. Responden yang mengetahui program kredit usaha rakyat kecil, seperti program-program tentang Takesra, Kukesra, LKURK/ lembaga kredit usaha rakyat kecil juga masih sedikit, yaitu sekitar 25 persen dan sisanya sebesar 75 persen responden banyak yang belum mengetahui program-program tersebut.

Jika responden memiliki usaha, maka pemasarannya dilakukan secara konvensional yaitu dijajakan sendiri keliling kampung, dititipkan ke toko-toko, atau dipasarkan dari mulut kemulut. Sekitar 78 persen belum ada sebuah institusi besar baik itu milik pemerintah maupun swasta yang siap menampung hasil usaha atau produksi masyarakat miskin di Kota

Mojokerto. Hanya 22 persen hasil usaha atau produksi masyarakat miskin sudah ada yang menampung.

Motivasi dari pemerintah setempat atau pihak swasta kepada masyarakat miskin agar mampu keluar dari jerat kemiskinan sudah cukup, yaitu sekitar 43 persen sudah mendapat motivasi dari pemerintah setempat dan pihak swasta melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan, dan sisanya, yaitu 57 persen masih belum. Sementara kesungguhan dan kemauan pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto menurut penilaian responden 70 persen responden menilai bahwa pemerintah cukup sungguh-sungguh dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan tata cara dan metode serta penjelasan tentang program pemberdayaan masyarakat miskin dinilai oleh responden 74 persen cukup jelas dan mudah diikuti.

Ditinjau dari sisi pemerintah, swasta, dan legislatif upaya-upaya atau kiprah mereka terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto bisa dilihat dari apa bentuk program perlindungan yang telah diberikan. Rata-rata program perlindungan yang diberikan oleh Pemkot Mojokerto adalah pemberian Jamsos, Raskin, pelatihan pendampingan kepada petani, dan pemberian bantuan Saprodi.

Bentuk program-program motivasi yang telah dilakukan adalah antara lain (1) pemberian bantuan tanaman berpotensi untuk bisa dimanfaatkan dan dijual langsung; (2) Program sanistasi berbasis masyarakat dimana mulai dari

perencanaan sampai operasional dilakukan oleh masyarakat; (3) Pagelaran lomba gelar makanan tradisional; (4) meningkatkan intensifikasi lahan pekarangan melalui program bantuan bibit tanaman hortikultura yang punya nilai ekonomis di tiap-tiap kelurahan; dan (5) Program demo plot dan penghijauan.

Sementara dari sisi swasta sumbangannya terhadap pemberdayaan masyarakat miskin masih sebatas pada pemberian secara insidental seperti pemberian-pemberian yang bertepatan dengan hari-hari besar keagamaan atau kalau ada acara-acara yang diadakan oleh pemda. Adapun upaya-upaya pihak-pihak swasta dalam memberdayakan masyarakat miskin dengan cara membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Dari sisi legislatif sampai saat ini belum ada produk-produk peraturan daerah di Kota Mojokerto yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat miskin berbasis lingkungan.

Bahwa upaya "memberdayakan masyarakat miskin" sebagai sebuah tujuan mulia sangatlah tidak mudah dan memerlukan sebuah proses yang panjang. Disamping sebuah tahap-tahapan yang harus dilalui, ada juga aspek-aspek lain yang harus dilakukan oleh pemerintah, swasta, dewan, dan masyarakat miskin serta tokoh masyarakat itu sendiri. Proses dan aspek-aspek yang harus dilalui dan dilakukan adalah pelibatan masyarakat miskin (responden) dan tokoh masyarakat itu sendiri.

Dari responden yang diwawancarai rata-rata 40 persen pernah dilibatkan. Sementara 60 persen tidak pernah dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto. Selain itu partisipasi serta usulan dan keinginan responden rata-rata diterima atau diperhatikan oleh pemerintah setempat.

Begitu juga dalam setiap pengambilan keputusannya, forum sangat menghargai pendapat yang diajukan oleh peserta rapat. Hanya saja program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto jika dianalogkan sebagian besar masih merupakan "pemberian ikan, bukan kail". Seperti misalnya bantuan Raskin, BLT, Jamkesmas, peralatan usaha, dan pinjaman dana bergulir. Pemberian bantuan berupa pelatihan hanya 2 persen, dan bantuan kredit tanpa bunga hanya sebesar 4 persen. Sementara sebesar 61 persen belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa, baik ikan maupun kail.

Pengenalan dan aksesibilitas warga miskin ke Perbankan masih minim, begitu juga pengetahuan responden tentang program kredit usaha rakyat kecil, misalnya Takesra, Kukesra, LKURK/ lembaga kredit usaha rakyat kecil, dan PNPM (program nasional pemberdayaan mandiri). Jikalau warga miskin punya usaha pemasarannya pun juga terbatas dan belum ada institusi atau lembaga dari pemerintah dan non-pemerintah yang menampung produksi mereka.

Selanjutnya upaya-upaya memotivasi dari pemerintah setempat atau pihak swasta kepada masyarakat miskin agar mampu keluar dari jerat kemiskinan

sudah cukup lumayan. Kesungguhan dan kemauan pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mojokerto sudah juga cukup bagus dan mudah diikuti. Sementara kontribusi pihak swasta dan dewan masih sangat minim.

3. Dimensi Tujuan

Tujuan pemberdayaan masyarakat miskin yang sesungguhnya sangatlah luas, yaitu antara lain demi (1) tujuan demokratisasi; (2) kesetaraan masyarakat dengan pemerintah; (3) kebebasan berbicara; (4) kebebasan berkreativitas; (5) hak untuk merencanakan; (6) hak untuk mengelola asset lokal; (7) hak untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan; (8) hak untuk menikmati jerih payah sebagai buah pembangunan adalah sekaligus tujuan yang akan dituju oleh gerakan pemberdayaan masyarakat.

Namun dalam penelitian ini dimensi tujuannya masih terbatas pada masalah-masalah kebutuhan ekonomi dan kemampuan memberikan jaminan kehidupan kepada keluarganya. Karena itu dari data-data primer dan sekunder yang diperoleh bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis lingkungan di Kota Mojokerto masih sangat tergantung dari *political will* atau kemauan politik dari *stakeholder*, yaitu pemerintah, legislatif, masyarakat dan tokoh masyarakat, serta pihak swasta.

Jika dilihat dari data-data yang diperoleh, *political will* atau kemauan politik dari stake holder itu ada keinginan untuk memberdayakan, hanya dalam pelaksanaannya masih bersifat normative

dan umum serta kurang intensifnya pembinaan dan kurang adanya keberlanjutannya.

Sementara program-program lainnya yang lebih menitik ke sasaran masih dalam taraf wacana atau bahkan mungkin belum ada. Selanjutnya yang sudah berjalan merupakan pelaksanaan dari program-program pemerintah pusat seperti PNPM. Dan belum ada tujuan pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar spesifik yang datangnya dari Pemkot Mojokerto.

4. Dimensi Indikator

Bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis lingkungan di Kota Mojokerto dalam penelitian ini hanya mengukur pada aspek kemampuan dan aktivitas ekonomi serta kemampuan menyiapkan masa depan keluarga.

Dari data-data primer yang diperoleh dapat diterangkan bahwa dari aspek kemampuan ekonomi ditinjau dari sisi penghasilan, rata-rata penghasilan per bulan responden adalah antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta.

Selanjutnya ditinjau dari aspek kepemilikan alat-alat transportasi yang dimiliki oleh responden, 72 persen responden hanya memiliki alat transportasi konvensional, yaitu sepeda pancal, becak, dan sepeda montor. Sementara 28 persen tidak mempunyai peralatan transportasi apa pun.

Adapun alat-lat transportasi yang dimiliki oleh responden tersebut adalah sepeda pancal 41 persen, becak 17 persen, dan sepeda motor 42 persen. Selanjutnya

jika responden memiliki sedikit uang maka sekitar 70 persen responden akan mempergunakan untuk membeli Sembako, sebanyak 2 persen responden akan menggunakan untuk membuka usaha dagang, sebanyak 2 persen responden akan menabungnya, dan 26 persen tidak tahu akan digunakan untuk apa jika memiliki sedikit uang.

Sementara jika responden memiliki uang dalam jumlah yang banyak maka mereka akan mempergunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya beragam. Yaitu untuk beli rumah dan tanah 17 persen, menabung 9 persen, kebutuhan sekolah anak 10 persen, memenuhi kebutuhan pokok 22 persen, membuka usaha 4 persen, beli kendaraan 9 persen, dan tidak tahu 29 persen.

Ditinjau dari kemampuan responden untuk (1) membeli kebutuhan pokok; (2) membeli alat transportasi; dan (3) memberikan jaminan masa depan kepada keluarganya berturut-turut adalah sebagai berikut.

Kemampuan responden untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi keluarganya sehari-hari, sebanyak 72 persen mengatakan mampu dan 28 persen mengatakan tidak mampu.

Kemampuan responden untuk membeli alat-alat transportasi seperti sepeda pancal, becak, dan sepeda motor, sebanyak 16 persen mengatakan mampu dan sebanyak 84 persen mengatakan tidak mampu.

Kemampuan responden untuk memberikan jaminan masa depan bagi keluarganya, sebanyak 43 persen

mengatakan mampu dan sebanyak 57 persen mengatakan tidak mampu.

Bahwa untuk mengukur apakah pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka indikator pengukurannya adalah membandingkan kriteria normatif dengan realita. Jika kesenjangannya kecil maka pemberdayaan masyarakat relatif berhasil, sebaliknya apabila kesenjangannya terlalu besar maka pemberdayaan masyarakat tidak berjalan.

Pada penelitian ini indikator diukur hanya berdasarkan aspek kemampuan dan aktivitas ekonomi serta kemampuan menyiapkan masa depan keluarga. Aspek kemampuan dan aktivitas ekonomi terkait dengan rata-rata penghasilan yang dinilai masih sangat rendah yaitu di bawah Rp 1 juta dan kepemilikan peralatan transportasi oleh responden, dimana sebanyak 72 persen rata-rata hanya memiliki alat transportasi yang bersifat konvensional, yaitu sepeda pancal, becak, dan motor sedangkan sisanya 28 persen tidak memiliki peralatan transportasi sehingga dalam melakukan mobilitas mereka harus mengandalkan angkutan umum. Sehingga untuk aktivitas sehari-harinya warga miskin harus mengeluarkan biaya transpor.

Sementara daya beli untuk membeli peralatan transportasi dimaksud sangat terbatas. Hanya 16 persen responden yang mampu membeli peralatan transportasi seperti sepeda pancal, becak, dan sepeda motor jika mereka disuruh membeli peralatan transportasi dimaksud.

Selain itu menurut mereka, 70 persen jika mereka memiliki uang dalam jumlah yang tidak banyak, maka responden lebih baik membelanjakannya untuk memenuhi

perut alias kebutuhan pokok untuk keluarga. Begitu juga jika pemerka memiliki uang dalam jumlah yang besar, 22 persen responden akan mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Indikator lainnya adalah kemampuan memberikan jaminan masa depan kepada keluarganya, sebanyak 57 persen responden merasa tidak mampu memberikan jaminan masa depan kepada keluarganya. Jadi jika disimpulkan, maka indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis lingkungan ditinjau dari sisi ekonomi dan kemampuan memberikan jaminan masa depan kepada keluarganya masih relatif kurang berhasil.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

- Sekitar 48 persen penduduk miskin di Kota Mojokerto memiliki pekarangan kosong seluas 2 x 3 M² sampai 600 M² dimana sebagian besar sudah dimanfaatkan dengan mengolahnya untuk beternak, berkebun, berdagang, atau untuk kontrakan. Namun pemanfaatannya kurang optimal. Padahal pekarangan-pekarangan tersebut bisa ditingkatkan sebagai lahan pertanian hortikultura dengan menanam jenis-jenis tanaman-tanaman keras seperti Sirih Merah, Jambu, Mangga, dan nagka. Atau memanfaatkannya sebagai lahan peternakan dan perikanan dengan memelihara ikan seperti yang dilakukan oleh warga Desa Canggung di Kecamatan Badas, Pare, Kediri dengan

beternak ikan konsumsi seperti ikan Emas, Tawes, Lele atau ikan hias.

- Kebijakan Pemkot Mojokerto dalam memberdayakan masyarakat miskin berbasis lingkungan sebatas menjalankan program-program kebijakan dari Pemerintah Pusat yang masih menekankan pada bantuan langsung masyarakat. Belum mengoptimalkan aspek-aspek substansial lainnya seperti pengembangan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal, serta bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Untuk itu berdasarkan program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) Kota Mojokerto Tahun 2009 - 2014 yang tertuang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau SPKD dan berdasarkan konsep PNPM Mandiri serta hasil temuan dalam penelitian ini maka perlu disusun suatu model pemberdayaan masyarakat miskin berbasis lingkungan di Kota Mojokerto.

Rekomendasi

- Kepada Pemkot Mojokerto:
 1. Segera menggerakkan dan melakukan motivasi serta fasilitasi kepada warga miskin yang mempunyai lahan atau pekarangan kosong untuk memanfaatkannya sebagai lahan pertanian hortikultura dan perikanan.
 2. Secara berangsur lebih memberdayakan masyarakat yang berbasis lingkungan dengan

penekanan pada pengembangan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal, serta bantuan pengelolaan dan pengembangan program.

3. Mendorong terselenggaranya *good governance*, dimana prinsip-prinsip pembangunan ditekankan pada tiga sektor, yaitu *state, private sector*, dan *public society*.
 4. Mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan meningkatkan koordinasi serta harmonisasi program antar lembaga terkait.
- Kepada warga miskin direkomendasikan agar tidak selalu dan membiasakan diri menempatkan tangan di bawah atau dalam bahasa Jawa selalu memosisikan diri dengan istilah "krido lumahing asto".
 - Kepada perusahaan-perusahaan di Kota Mojokerto direkomendasikan agar didorong untuk lebih berpartisipasi secara riil dengan cara lebih memerankan program *coorporate social responsibility (CSR)*.
 - Kepada legislatif Pemkot Mojokerto direkomendasikan untuk segera menyusun rancangan peraturan daerah yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat miskin berbasis lingkungan di Kota Mojokerto.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat
2003. *Participatory Research Appraisal*

Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penerbit Humaniora, Bandung.

Bapemas, 2008. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Pemkot Mojokerto*, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Huraerah, Abu, 2008. *Pengorganisasian & Pengembangan masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis kerakyatan*. Penerbit Humanioran, Cetakan Pertama, bandung.

Kartonono, Kartini, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Penerbit CV. Mandar Maju, Cetakan ketujuh, Bandung.

Manullang, Sastrawan dkk, 2008. *Community Development - Terjemahan*. Penerbit Pustaka Pelajar, edisi I, Yogyakarta.

Mulyana, Deddy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan keempat, Bandung.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Patilima, Hamid, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit ALFABETA, Cetakan kedua, Bandung.

Suharto, Edi, Phd, 2005. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat*. Penerbit Refika Aditama, cetakan pertama, Bandung.

Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Penerbit

Pustaka pelajar, Cetakan I,
Yogyakarta.

Sukendra, K, 2006. *Peranan Birokrasi Dalam
Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit
Alfabeta, Cetakan kesatu, Bandung.

Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian
Kualitatif*. Penerbit CV. ALFABETA,
Cetakan ke 4, Bandung.

Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri, 2007.
*Pedoman Umum Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri*, Jakarta.

Wahyudi, Isa, Busyra Azheri, 2008.
*Corporate Social Responsibility :
Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*.
Penerbit Inspire, Cetakan pertama,
Malang.